



## **Sistem Pembayaran Pendidikan di SMAIT-TQ Ihya Assunah Kota Tasikmalaya**

**Cecep Mutakin, Imas Rullah, Nurul Hidayat**

IAI An Nur Lampung

[tjep29@gmail.com](mailto:tjep29@gmail.com), [imasabelia94@gmail.com](mailto:imasabelia94@gmail.com), [n.hidayat@gmail.com](mailto:n.hidayat@gmail.com)

### ***Abstract***

*Educational financing are essential component in seeking success education. Education financing is an analysis of financing sources, the use and the system or mechanism the allocation of finances in a fair manner, proper and open education financing account. School resources private derived from either the government, the local government, the community, creative and business school. School financing component consist of the operational costs of human resources and non human resources, of investment costs human resources and non human resources, and the cost of the personal, exercised on a unit of education, education providers, and personal students.*

*School financing excellent model covered the cost operational routine human resources and non human resources, the investment human resources and non human resources, and the cost of specific programs certain seed both programs academic or non- academic programs which is typical school. School excellent financing more than 50 percent of allocated and applied to the process of learning to reach the target output high*

**Keywords:** *Financing, Financing resource, Financing component, and School Excellent Models Funding*

## Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah analisis terhadap sumber-sumber pembiayaan, penggunaan dan sistem atau mekanisme pengalokasian dana secara adil, terbuka tepat dan akuntabel. Sumber pembiayaan pendidikan sekolah swasta berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha kreatif sekolah. Komponen pembiayaan sekolah terdiri atas biaya operasional sumberdaya manusia (SDM) dan non- sumberdaya manusia, biaya investasi SDM dan non-SDM, dan biaya personal, yang dilaksanakan pada satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan pribadi peserta didik.

Model pembiayaan sekolah unggul meliputi biaya operasional rutin SDM dan non-SDM, biaya investasi SDM dan non-SDM, dan biaya khusus program-program unggulan tertentu baik program akademik maupun program non-akademik yang menjadi ciri khas sekolah. Pembiayaan sekolah unggul lebih dari 50% dialokasikan dan digunakan untuk proses pembeajaran untuk mencapai target output yang tinggi

**Kata kunci:** *Pembiayaan, Sumber Pembiayaan, Komponen Pembiayaan, dan Model Pembiayaan Sekolah Unggul*

## PENDAHULUAN

Nilai modal manusia suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar, tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual. Pakar ekonomi Adam Smith (1952) mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan kata lain, kesejahteraan, kekayaan, dan kejayaan suatu bangsa sangat tergantung kepada keunggulan intelektual sumberdaya manusia. Dengan demikian, pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan sosial ekonomi adalah melalui cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SAT dan MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Sekolah bermutu perlu ditunjang dengan penyediaan sumberdaya pendidikan antara lain dana yang memadai, gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku-buku dan alat-alat bantu mengajar yang memadai.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang memadai menjadi hal yang mendasar bagi keberhasilan program pendidikan yang bermutu. Mengingat pentingnya pembiayaan pendidikan, maka pemerintah menentukan standar nasional pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan bermutu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model pembiayaan yang tepat, adil, mencukupi, dan memberdayakan semua komponen bangsa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, agar sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme

pengalokasian, efektivitas dan efisiensi penggunaannya, serta akuntabilitas hasil dengan segala problematikanya baik pada tingkat makro, meso, maupun mikro dapat dikelola dengan baik.

Menurut catatan Kemenag jumlah lembaga pendidikan sekolah tidak kurang dari 18% dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Sedangkan besaran prosentasi tanggung jawab Kementerian Agama dalam penuntasan wajar Dikdas secara nasional, dihitung berdasarkan proporsi siswa yang belajar di sekolah dan salafiyah dibagi jumlah peserta didik yang tertaATung di sekolah, sekolah, salaiyah, paket, sekolah terbuka dikalikan 100%, maka proporsi tanggung jawab Kemenag secara nasional untuk MI adalah 9,77% dan untuk MTs 20,38%. Pada tahun 2016 APK MI telah mencapai 12,93%, MTs mencapai angka 23,54% dan MA mencapai angka 9,75%.<sup>1</sup> Sekalipun proporsi tanggung jawab kemenag lebih kecil jika dibandingkan dengan proporsi tanggung jawab Kemdikbud, namun persoalan pembiayaan pendidikan telah menjadi masalah sekolah pada umumnya. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di sekolah menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalian dana karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali.<sup>2</sup> Di samping itu permasalahan mengenai manajemen keuangan sekolah. Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk rela berkorban baik moril maupun materil. Di sisi lain sekolah harus mampu memberikan jaminan kualitas yang membanggakan dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan model pembiayaan yang cocok, adil, melimpah yang melibatkan partisipasi banyak pihak sebagai sumber pendanaan, dan tranparan dalam pengelolaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PEMBIAYAAN DAN BIAYA PENDIDIKAN**

Pembiayaan pada dasarnya terkait dengan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, Terbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang.<sup>1</sup> Pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Menurut C. Benson (dalam Nanang Fatah, 2012) kriteria yang digunakan untuk menilai sistem

---

<sup>1</sup> Yahya "Sistem Manajemen Pembiayaan pendidikan: suatu studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah dasar diprovinsi Sumatra Barat", *Disertasi*, (Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 43-44

pembiayaan pendidikan, yaitu adekuasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan, efisiensi dalam distribusi sumber daya, dan pemerataan dalam distribusi sumber-sumber daya pendidikan.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Mulyono mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan juga berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.<sup>2</sup> Secara spesifik Levin (1987) mengemukakan bahwa pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sebuah proses upaya pendistribusian sumber-sumber pendapatan, alokasi dan penggunaan biaya untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, di berbagai wilayah geografis, tingkat pendidikan, dan satuan pendidikan.

Beberapa dasar penghitungan satuan biaya (*unit cost*) pendidikan dalam berbagai kepustakaan yang ada antara lain: penghitungan berdasarkan biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*); penghitungan berdasarkan biaya pribadi (*privat cost*) dan biaya sosial (*social cost*); atau penghitungan berdasarkan biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*nonmonetary cost*).<sup>4</sup>

Biaya langsung terdiri terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat- alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya

---

<sup>2</sup> Thomas H Jhones, *Introduction to School Finance Technique An Social Policy*, (New York: Macmillan Publishing CoATany, 1985), h. 12.

<sup>3</sup> Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>4</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menegah*, (Bandung: Remaja Rsdakarya, 2010), h. 4.

tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan juga dapat digolongkan menjadi *monetary* dan *non monetary cost*. *Monetary cost* merupakan nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang sedangkan *non monetarry cost* adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti biaya yang diperhitungkan dimana seorang siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang tetapi digunakan untuk membaca buku.<sup>5</sup> Dilihat dari sifatnya biaya dapat dibedakan menjadi biaya rutin dan biaya investasi atau pembangunan. Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin pada lembaga-lembaga pendidikan dituangkan dalam daftar isian kegiatan. Penyaluran subsidi pemerintah ke satuan-satuan pendidikan dapat berupa uang yang jelas peruntukannya, dana tambahan berbentuk hibah, atau berupa tenaga dan barang seperti guru/tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran dan perlengkapan sekolah.<sup>6</sup> Dengan demikian penghitungan biaya pendidikan didasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya pribadi dan biaya social atau biaya dalam bentuk uang dan bukan uang, baik biaya yang sifatnya rutin maupun pembangunan.

## ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN

Ada beberapa konsep dalam analisis pembiayaan pendidikan. Nanang Fatah mengemukakan beberapa dasar dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya pendidikan adalah (1) biaya uang vs biaya oportunitas, (2) biaya modal vs biaya operasional/rutin, (3) biaya rata-rata (AC) dan biaya marjinal (MC), (4) biaya privat vs biaya sosial pendidikan, (5) *joint costs* pendidikan, dan (6) pendekatan kecukupan (*adequacy approach*).<sup>7</sup> Biaya modal vs biaya operasional/rutin, bahwa biaya operasional meliputi semua pengeluaran pada barang-barang konsumtif seperti buku, *stationery*, bahan bakar, dan jasa lainnya yang dapat membawa benefit dalam jangka menengah atau pendek. *Capital costs* atau *expenditure* meliputi pembelian *durable assets* seperti gedung atau perlengkapan yang diharapkan memberikan keuntungan untuk jangka panjang. Pembelian barang-barang capital/modal ini dapat dikatakan sebagai suatu investasi.

---

<sup>5</sup> Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 160.

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 4-5

<sup>7</sup> Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, *Op.cit.*, h. 9-13.

Biaya Rata-rata (AC) dan biaya Marginal (MC) adalah analisis biaya berkaitan dengan total biaya pendidikan atau dengan *unit costs* (biaya per murid). *Unit costs* dihitung dengan cara: biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level, dan biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan. Biaya Marginal (MC) adalah tambahan biaya yang terjadi karena ada penambahan unit cost/murid yang mendaftar. Hubungan antara AC dan MC bervariasi antar berbagai institusi dan tergantung dari bentuk *costs function*, yaitu yang berkaitan antara *cost* dengan *size*. Kemungkinan AC dan MC berubah naik, turun, atau tetap, sebagai hasil kenaikan murid yang mendaftar.

Biaya privat vs biaya sosial pendidikan, dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan, seperti di beberapa negara dimana pendidikan dasar dan menengah diberikan gratis, sehingga *direct private cost* atau juga yang disebut biaya personal hanya terbatas untuk membeli buku, seragam, dan transport. Kalau jenis pendidikan tersebut bersifat wajib, maka tidak ada *private opportunity cost* dalam bentuk pendapatan yang hilang karena melanjutkan pendidikan, paling hanya dari biaya pajak yang dikenakan pemerintah secara eksplisit.

*Joint costs* pendidikan digunakan untuk menilai implikasi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan (seperti *cognitive* dan *noncognitive outputs*) atau oleh pendidikan tinggi (*teaching* dan *research*). Karena sulit diukur single unit cost untuk single output/product. seperti: beberapa input menghasilkan dua atau lebih output, misalnya bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain. Pendekatan kecukupan (*adequacy approach*) menjelaskan bahwa pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada, namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Oleh karenanya, berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh faktor-faktor: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive), rasio siswa dibandingkan jumlah guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang), dan perubahan dari pendapatan (*revenue theory of cost*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dicermati bahwa dalam menghitung biaya pendidikan faktor input dan output pendidikan serta proses yang ada di dalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dapat dihitung menggunakan teknik *cost analysis* baik *cost efectiveness* atau analisis *cost benefit*. Hasil perhitungan biaya dapat mengevaluasi apakah investasi SDM melalui pendidikan menguntungkan atau tidak, untuk pribadi dan untuk masyarakat luas.

### **PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA UNGGULAN (KASUS SMAIT-TQ IHYA ASSUNAH TASIKMALAYA)**

Di tengah fenomena ketertinggalan sekolah swasta dibandingkan sekolah umum, SMAIT-TQ IHYA ASSUNAH Tasikmalaya yang berlokasi di Paseh Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat, berstatus sekolah swasta, berhasil keluar dari gambaran sekolah yang serba tertinggal dan membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang berhasil. ASSUNAH Tasikmalaya berhasil menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas di Kota Tasikmalaya dan seluruh Indonesia. Tahun 2022, uang pangkal yang harus dibayarkan orang tua siswa kepada lembaga pendidikan itu sebanyak sepuluh juta rupiah. Tahun 2022, AT berhasil menampung 8 rombel dengan jumlah siswa baru sebanyak 115 anak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan standar nasional pendidikan, bahkan seringkali AT menolak sebagian pendaftar yang lain. Sekolah ini dinilai telah berhasil dari aspek-aspek tertentu menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat perkotaan di Tasikmalaya.<sup>8</sup>

Keberhasilan AT menarik perhatian masyarakat kelas menengah kota merupakan suatu fenomena baru, dan dikatakan suatu model atau trend baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. AT melayani pendidikan tingkat menengah yaitu Sekolah Menengah Atas. AT memilih untuk tetap menjadi sekolah dengan status swasta, dengan alasan kemandirian. Status kelembagaan swasta dianggap lebih strategis dan menantang jika dibandingkan AT berstatus negeri. Status swasta para pengelola lebih leluasa memasang target sekaligus berimprovisasi dalam pencapaian target tersebut.

Menghadapi kebijakan pemerintah terkait pendidikan gratis dan implementasi pembiayaan oleh pemerintah daerah, dijadikan cambuk untuk membuktikan bahwa sekolah tetap bisa *survive* di tengah keadaan yang serba sulit karena krisis Kenyataannya, AT berhasil mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan dan berhasil

---

<sup>8</sup> Muhamad Murtadlo, "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Swasta Unggulan" Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 14, Nomor 1, April 2016.

membuktikan diri menjadi sekolah unggulan. Menurut para pengelola, mengelola sekolah dan menjadikannya sekolah unggulan sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa tergantung kepada negara, walau tidak dipungkiri AT menerima juga dana BOS dan bantuan dana pendidikan yang diberikan Kemendikbud.

Sekolah perlu mengerahkan segenap kemampuan untuk menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan berani bersikap dalam kondisi apapun. Di tengah kebijakan sekolah gratis, AT justru menarik biaya dari siswa dan bahkan menarik SPP lebih tinggi dibandingkan sekolah sederajat di sekitarnya. Dampak kebijakan ini, ternyata AT semakin diminati masyarakat dan penerimaan siswa setiap tahun selalu mencapai target. Strategi menaikkan iuran siswa ini pernah menjadi catatan kritik, seolah AT hanya membidik golongan sosial ekonomi menengah ke atas, namun kritik itu dibantah oleh pihak AT. AT sebenarnya tidak membidik calon siswa dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas, hanya saja ketika ditawarkan prasyarat untuk mengikuti proses pendidikan dengan jumlah biaya tertentu, ternyata masyarakat mampu memenuhinya.

Menaikkan biaya pendidikan, biasanya mempunyai konsekuensi tertentu bagi sekolah. Hal itu disadari betul oleh AT, oleh karena itu AT memilih menjadi lembaga pendidikan swasta. Dengan demikian, AT bisa menentukan harga biaya pendidikan yang ditawarkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu maka lembaga pendidikan ini sejak awal menerapkan biaya yang lebih tinggi.

Beberapa kebijakan AT dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang mandiri dan mampu berkontestasi dalam konteks globalisasi adalah 1) sekolah sejak awal digagas untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu. Keinginan ini terkait dengan keberadaan sekolah ini yang berada di lingkungan perumahan orang terdidik, yaitu di lingkungan kota Tasikmalaya, 2) Sekolah menetapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sekolah di sekitarnya untuk memperoleh mutu yang tinggi, 3) perkembangan sekolah banyak didukung oleh peran masyarakat yang berasal dari kalangan pegawai swasta, dimulai masyarakat sekitar kota Tasikmalaya hingga masyarakat luas, dan 4) sekolah membangun image dengan mempromosikan kegiatan siswa melalui media televisi, sehingga animo masyarakat dan peminat meningkat.<sup>21</sup>

Selanjutnya AT menerapkan strategi pembiayaan antara lain: 1) menetapkan sumbangan/waqaf dalam jumlah tertentu bagi siswa yang diterima. Pada saat ini jumlah bantuan sudah di atas miliaran rupiah, yang dialokasikan untuk dana

investasi pembangunan gedung dan pengadaan prasarana jangka panjang; 2) mewajibkan siswa untuk membayar SPP bulan yang jumlahnya lebih tinggi dibanding sekolah di sekitar. Dana SPP dipergunakan untuk operasional bulanan, dan secara lebih khusus untuk mengkover honor/gaji pendidik dan tenaga kependidikan; 3) menerima bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk dana BOS; 4) mewajibkan membayar uang tahun ajaran baru. Dana ini dialokasikan untuk seragam, buku-buku dan kegiatan ekstrakurikuler; 5) dana paket bantuan (tentatif tergantung pihak sponsor yang memberikan bantuan program).

**Tabel 1. Jenis, Sumber dan Alokasi Pembiayaan pada Assunah Tasikmalaya Tahun 2022**

Jenis biaya	Asal	Penggunaan biaya	Prosentase cover area	Peruntukan
Uang Pangkal Siswa Baru	Orang tua	Biaya Investasi	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan gedung</li> <li>• Peralatan permanen</li> <li>• Pemeliharaan peralatan permanen</li> </ul>
Dana BOS	Pemerintah	Biaya Operasional		13 item Asnap sesuai Juknis penggunaan dana BOS Kemdikbud
SPP/Bulan	Orang tua		85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji/honor (70%)</li> <li>• Pengembangan SDM</li> <li>• Operasional lainnya</li> </ul>
Uang Tahun Ajaran Baru	Orang tua	Biaya tambahan	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seragam</li> <li>• Buku-buku</li> <li>• Kegiatan Eskul</li> </ul>
Dana Paket Bantuan	Sponsor: Pemerintah/Swasta	Biaya Program	100%	Sesuai dengan Program Sponsor

Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dana BOS baru mencukupi dana operasional rutin sekitar 15% dari total kebutuhan rutin bulanan, maka Assunah Tasikmalaya meminta SPP dari orang tua. Besaran SPP kelas 10- 12

adalah Rp 1.400.000/bulan, kelas 10 sebesar Rp 1.400.000/bulan, kelas 11 sebesar Rp 1.400.000/bulan, kelas 12 sebesar Rp 1.400.000/bulan.<sup>22</sup> Dana SPP tersebut digunakan untuk memenuhi 85% kekurangan anggaran. SPP dialokasikan sebagian besar untuk gaji/honor guru dan tenaga kependidikan sekitar 70%. Sisanya 30% untuk mendukung kekurangan operasional rutin di luar gaji/honor sebagaimana item-item pembiayaan BOS sesuai Juknis khususnya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

### **SUMBER PEMBIAYAAN SEKOLAH UNGGULAN DAN PEMANFAATANNYA**

Sekolah unggul menurut Syafaruddin Edmons adalah sekolah yang memiliki karakteristik, antara lain guru-guru memiliki kepemimpinan yang kuat, guru-guru memiliki harapan yang tinggi untuk mendukung pencapaian prestasi murid, atmosfer sekolah yang tidak kaku, sejuk, tanpa tekanan dan kondusif dalam seluruh proses pengajaran atau suatu tatanan iklim yang nyaman, sekolah memiliki pengertian yang luas tentang focus pengajaran dan mengusahakan efektivitas sekolah dengan energy dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pengajaran secara maksimal, dan sekolah dapat secara efektif menjamin kemajuan murid yang dimonitor secara periodik.<sup>23</sup> Berdasarkan karakteristik tersebut, maka sekolah Islam dikatakan unggul jika sekolah-sekolah tersebut elit dari sudut akademik. Artinya hanya siswa-siswa terbaik yang dapat diterima oleh sekolah itu melalui ujian masuk atau ujian saringan yang sangat kompetitif, guru-guru sebagai tenaga pendidik telah diseleksi secara kompetitif, hanya yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa diterima sebagai guru, sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang jauh lebih lengkap dan lebih baik, sehingga menjadikan siswa di sekolah itu jauh lebih baik secara akademik. Sekolah swasta lebih leluasa memasang target sekaligus berinovasi dalam pencapaian target sekolah. Sumber-sumber pembiayaan sekolah unggul dapat berasal dari bantuan-bantuan antara lain:

*Pertama;* dana BOS. Dana BOS SMA yang diberikan oleh pemerintah melalui kemendikbud sebesar Rp 1.500.000,- per anak<sup>24</sup>. Dana BOS dipergunakan hanya untuk biaya operasional sekolah, khusus untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan 13 item asnap sesuai Juknis yaitu: 1) Pengembangan Perpustakaan, 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, 4) Kegiatan Ulangan dan Ujian, 5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, 6) Langganan daya dan jasa, 7) Rehab ruang kelas atau perawatan sekolah, 8) Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS, 9) Pengembangan profesi guru dan tenaga

kependidikan, 10) Membantu siswa miskin, 11) Pembiayaan pengelolaan BOS, 12) Pembelian perangkat coATuter desktop/ laptop, dan 13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Dana BOS hanya untuk pembiayaan operasional sekolah, namun sekolah swasta memiliki keleluasaan dibandingkan sekolah negeri khususnya dalam pembiayaan gaji/honor guru. Dari informasi yang diperoleh, dana BOS baru mencukupi dana operasional rutin sekitar 15% dari total kebutuhan rutin bulanan.

*Kedua; Bantuan Khusus Murid (BKM)/Student Assistance or Scholarship/Kartu Indonesia Pintar (KIP).* BKM dan KIP atau beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat penerimaan murid dari kelompok keluarga miskin di sekolah tingkat SAT

*Ketiga; Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.* DAK adalah bentuk dana yang bersifat khusus, artinya penggunaan dana berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan pihak pemberi atau pemerintah pusat. DAK diperuntukkan bagi sektor dan ditujukan untuk peningkatan infrastruktur, dan didesain sebagai program bantuan/grant yang spesifik. Dimaksudkan untuk merangsang pembelajaran tambahan pada prioritas nasional. DAK untuk pendidikan diajukan untuk mendukung rehabilitasi ruang kelas dan ruang gedung sekolah dan secara khusus tidak ditujukan untuk operasional sekolah, biaya administrasi, perjalanan atau pelatihan. DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan wajib daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan. DAK bidang pendidikan 2015 untuk pendidikan dasar (SD-SAT) sebesar 60% dari total yang diterima Kemdikbud. DAK SAT sebesar Rp 2.510.325.000,- dari total 10.041.300.000,-, pengelolaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah penerima DAK. Menurut Miftah Ardian dalam tulisannya di Harian KoATas tanggal 11 April 2017, mengemukakan bahwa Pemda dinilai belum optimal dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2016 BPK, menyebutkan 8,4 triliun DAK Pendidikan belum terserap.

*Keempat; Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.* Yayasan harus memiliki jejaring kerja sama luar dan dalam negeri, untuk memperoleh donatur dengan lembaga-lembaga resmi. Yayasan harus mampu mengembangkan sekolah dengan melakukan investasi dalam bentuk uang, tanah, dan sarana prasarana dalam jangka waktu tertentu dan melakukan usaha-usaha produktif atau membuka dan

menjalankan amal usaha-amal usaha untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan, seperti membuka toko, usaha pom bensin, perkebunan, uaha transportasi, perbankan, penyewaan lahan/gedung, dan usaha-usaha kreatif lainnya. Pengelolaan keuangan yayasan harus dilakukan secara akuntabel dan profesional.

*Kelima;* dana yang bersumber dari orang tua/wali siswa yang meliputi: 1) Uang Pangkal Siswa Baru, 2) SPP/Bulan, 3) Uang Tahun Ajaran Baru, dan 4) Dana Paket Bantuan. Uang pangkal siswa dapat dialokasikan untuk dana investasi, antara lain: pembangunan gedung, pemeliharaan gedung, peralatan permanen, dan pemeliharaan peralatan permanen. SPP/Bulanan dapat dialokasikan untuk Gaji/honor (70%), pengembangan SDM, dan operasional lain yang tidak dapat dicover oleh dana BOS. Uang Tahun Ajaran Baru digunakan untuk biaya pribadi siswa seperti: seragam, buku-buku, dan kegiatan eskul. Dana Dana Paket Bantuan dari sponsor baik pemerintah maupun swasta digunakan untuk pembiayaan sesuai dengan program dari sponsor.

*Keenam;* penggalangan dana abadi dari alumni muhsinin. Dana sumbangan dari alumni dan muhsinin yang dilakukan secara rutin melalui rekening yayasan atau sekolah untuk modal dana investasi, namun dapat digunakan setelah jangka waktu tertentu.

*Ketujuh;* usaha kreatif sekolah. Sekolah memiliki Tim Pengembangan Ekonomi Sekolah yang bertugas melakukan usaha-usaha kreatif baik secara mandiri maupun kerja sama, seperti: mengelola dan mengembangkan kantin sekolah, pulsa, pemberdayaan koperasi sekolah, foto copy, bazar, bantuan konsultasi, penyewaan sarana prasarana, beternak, bertani, intertainment, dll.

*Kedelapan;* zakat, infak, shadakah dan wakaf. Zakat, infak, shadakah dan wakaf (tunai dan non-tunai) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi sekolah. Sekolah harus mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggali dan menggunakan zakat, infak, sadakah dan wakaf sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Zakat, infak, shadakah dan wakaf dapat menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan dan alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia. Zakat merupakan kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu, bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan yang dapat digunakan untuk biaya operasional siswa dan guru untuk menunjang honor yang ada tidak mencukupi. Infak merupakan harta yang dikeluarkan sesuai perintah Islam tidak memiliki aturan nishab, penerima dan waktu, sangat potensial untuk pembiayaan pendidikan. Penarikan dan

pendistribusian infak oleh sekolah bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu baik untuk biaya investasi maupun operasional. Sadakah dalam terminologi syariat adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Dana shadakah dapat dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang kurang mampu secara finansial. Sedangkan wakaf sangat potensial untuk pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif. Harta wakaf yang dikelola sekolah dapat dimanfaatkan untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi peserta didik. Pada kenyataannya potensi yang besar ini belum sepenuhnya mampu diberdayakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam mampu menghasilkan output yang bermutu tinggi.

*Kesembilan;* dunia usaha dan industri. Kerjasama dengan dunia usaha dan industri dapat memanfaatkan CSR atau dana *charity* baik langsung dalam bentuk uang maupun sebagai sponsor (individu/kelembagaan) dalam bentuk program dan kegiatan. Peluang ini bisa dikembangkan menjadi kemitraan, seperti mendatangkan ahli atau pakar tertentu di bidang IT, penyuluhan kesehatan, bimbingan karier, praktik industri, menyediakan lokasi untuk perlombaan- perlombaan bidang seni, olah raga, karya Inovatif dan produktif, fee para peneliti yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di sekolah, mengundang mahasiswa dan dosen-dosen PT AIS untuk melakukan pengabdian masyarakat di sekolah. Dewasa ini terjadi pergeseran penyaluran dan pengelolaan dana CSR atau *charity* perusahaan, yang sebelumnya disumbangkan secara tersebar kepada lembaga pendidikan tertentu, saat ini dana CSR tersebut dikelola oleh perusahaan sendiri. Saat ini setiap perusahaan besar telah memiliki yayasan pendidikan dan menyelenggarakan serta mengelola lembaga pendidikan sendiri. Model ini lebih menjamin keluaran yang bermutu baik.

*Kesepuluh;* Kelompok masyarakat atau individu yang peduli terhadap pendidikan. Kelompok masyarakat dapat berbentuk komunitas, kelompok pemerhati pendidikan. Selain itu individu yang berpotensi untuk menjadi orangtua asuh peserta didik. Masih banyak potensi-potensi pembiayaan lain yang akan muncul seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat.

## SIMPULAN

Salah satu sumberdaya penting dalam sebuah lembaga pendidikan adalah sumber daya alam bentuk dana untuk pembiayaan seluruh komponen yang terlibat

dalam proses pembelajaran. Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan analisis sumber-sumber pembiayaan, pendistribusian/alokasi, dan sistem atau mekanismenya.

Permasalahan umum pembiayaan yang dihadapi sekolah adalah sulitnya menggali sumber-sumber pembiayaan pendidikan, karena secara umum mutu keluaran lembaga pendidikan Islam masih rendah, sehingga sangat terbatas akses terhadap sumber-sumber pembiayaan terutama dari orangtua/wali siswa sebagai sumber pembiayaan utama sekolah swasta. Zakat, infak, shadakah dan wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan rutin bagi sekolah-sekolah jika dikelola dengan baik dan dapat mencapai keunggulan sekolah. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan lainnya seperti: sumbangan orang tua/wali siswa, kelompok masyarakat, dunia usaha/industri, alumni, usaha kreatif sekolah perlu terus dikembangkan secara kreatif dengan pengelolaannya yang transparan, akuntabel dan profesional. Sedangkan bantuan dana dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai bentuk tetap diperlukan untuk pembiayaan operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013.
- Buku Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan tahun 2004-2009, Direktorat Pendidikan Sekolah.
- Blocher, E.J., 2001. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Terjm. Susty Ambarriani, Jakarta: Salemba EATat.
- Dedi Supriyadi, 2010. *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah*, Bandung: Rosdakarya
- E. Mulyasa, 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahrurozi, 2012. "Manajemen Keuangan Sekolah". *Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam*. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djati Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia.
- Jahja Umar, 2006. Dirjen Pendis, Pentaloka 2006, Wisma Depag Cisarua Bogor, Juli-Agustus

Kisbiyanto, 2014. "Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan," Elementary Vol.

2 No. 1 Januari-Juni 2014

Moch Idochi Anwar, 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Muhamad Murtadlo, 2016. "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Swasta Unggulan/ Education Financing Strategy In Favorite Private Sekolahs" *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Volume 14, Nomor 1, April.

Mujamil Qomar, 2015. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga.  
Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Ar-Ruzz Media.

Nanang Fattah, 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy

-----2012. *Ekonomo & Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Reaja Rosdakarya

-----, 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya